



පළාත පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමස්ත පළාත පාලන ආයතන
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
කොමියුනිතර් සහ පවුල
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

රජයේ සේවයේ පවත්වාගෙන යාමේ කාර්යාල (පළාත්) රාජ්‍ය සේවය
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
Laman: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> Pos-el: dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Sekretariat
Tim Kerja	: Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Outcome Program	: 82.85 Nilai
Nama Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Hasil Kegiatan	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Hasil Kegiatan	: 82.85 Nilai
Nama Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Output Sub Kegiatan	: 3 Dokumen

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
12. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
13. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023).

B. Gambaran Umum :

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta nasional. Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. **Salah satu tahapan dalam proses perencanaan daerah adalah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.** Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial.

Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang kecamatan dengan draf Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor tertentu. Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk menyampaikan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan aspirasi dan penyaringan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

II. Penerima Manfaat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

III. Strategi Pencapaian

A. Metode Pelaksanaan

Dalam rangka melaksanakan aktifitas untuk pencapaian keluaran dilakukan dengan: Rapat kerja dengan melibatkan Stakeholder terkait baik dari Kabupaten/Kota dan Provinsi.

B. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Waktu untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 12 bulan (Januari s.d Desember 2025).

1. Tahapan Pra-Forum Perangkat Daerah

- a. Pengorganisasian Forum Perangkat Daerah, yang terdiri atas:
 - 1) Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang berisi tentang Susunan Panitia Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah berikut tugasnya masing-masing;
 - 2) Pembentukan dan persiapan Tim Pemandu. Tim Pemandu berisi individu baik yang berasal dari unsur birokrasi maupun unsur non-birokrasi yang memiliki tugas untuk memfasilitasi Forum Perangkat Daerah;
 - 3) Persiapan teknis yang dilakukan oleh Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah
 - Penentuan jadwal pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan menyusun agenda acaranya
 - Pengidentifikasian dan mengundang peserta Forum Perangkat Daerah
 - Persiapan peralatan dan bahan materi, serta menentukan tim notulensi.
- b. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

2. Tahapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

- a. Pembukaan
 - 1) Laporan panitia;
 - 2) Sambutan/Pembukaan dari Kepala Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
- b. Diskusi panel narasumber Forum Perangkat Daerah
 - 1) Penyampaian Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2026

- 2) Dialog antara panelis dan peserta.
- c. Diskusi draf Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2026.
- d. Penyepakatan hasil pleno yang akan dijadikan rujukan dokumen Renja Perangkat Daerah.
- e. Penutupan Forum Perangkat Daerah
 - 1) Pembacaan Draft Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
 - 2) Penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta dan Kepala Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
 - 3) Penutupan oleh Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili.

3. Tahapan Pasca-Forum Perangkat Daerah

- a. Rapat kerja Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah bersama-sama dengan Tim Pemandu dan delegasi sektoral untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- b. Penyerahan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Bappeda.

IV. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu Pencapaian sasaran kegiatan adalah dalam tahun berkenaan/berjalan tahun 2025.

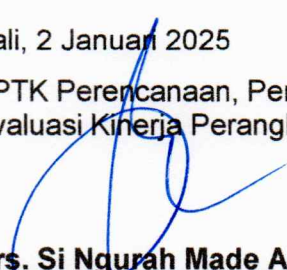
V. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran yang dibutuhkan sebesar **Rp. 88.455.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)** diperuntukkan untuk belanja alat tulis kantor dan makan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas untuk menunjang proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 2 Januari 2025

PPTK Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si

Pembina Tk.I

NIP 19710601 199301 1 003

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025						
Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 2.13.2.12.2.14.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Sub Unit Organisasi	: 2.13.2.12.2.14.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Kegiatan	: 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Aparatur, Pemerintah Desa					
Jumlah 2024	: Rp	19.500.000				
Jumlah 2025	: Rp	88.455.000				
Jumlah 2026	: Rp	25.000.000				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Indikator					Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja					82,85 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp 88.455.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen
Hasil	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja					82,85 Nilai
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					88.455.000
5.1	BELANJA OPERASI					88.455.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					88.455.000
5.1.02.01	Belanja Barang					15.715.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.715.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					8.466.300
[#] ASB-004 (FORUM PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH)						945.300
[-] Pelaksanaan Forum Perencanaan Perangkat Daerah						
	No. 10-1M Kenko	7	Buah	6.200		43.400
	Trigonal Clip No. 3 Atom	5	Kotak	11.800		59.000
	Lem Uhu Stick 21 Gr Uhu	3	Buah	36.900		110.700
	Binder Klip per box Re-Type	7	Box	21.200		148.400
	Tinta Printer 003, T 6642, T 6643, T 6644, T 6641 Epson	2	Unit	291.900		583.800
[#] ASB-005 (PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN)						7.521.000
[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan						
	No. 10-1M Kenko	5	Buah	6.200		31.000
	Tip Ex Correction Pen CT562	4	Buah	16.000		64.000
	Lem Uhu Stick 21 Gr Uhu	2	Buah	36.900		73.800
	Trigonal Clip No. 3 Atom	15	Kotak	11.800		177.000
	Binder Klip per box Re-Type	8	Box	21.200		169.600
	Tinta Printer 003, T 6642, T 6643, T 6644, T	24	Unit	291.900		7.005.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.632.500
	[#] NON ASB					
	Foto copy Hitam Putih biasa	3.265	Lembar	500		1.632.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover					3.366.200
	[#] ASB-004 (FORUM PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH)					517.200
	[-] Pelaksanaan Forum Perencanaan Perangkat Daerah					
	Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	6	Rim	86.200		517.200
	[#] ASB-005 (PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN)					2.849.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan					
	Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	32	Rim	86.200		2.758.400
	Kertas HVS F4 70 gr Sinar Dunia	1	Rim	90.600		90.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.250.000
	[#] ASB-004 (FORUM PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH)					2.250.000
	[-] Pelaksanaan Forum Perencanaan Perangkat Daerah					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	50	Orang/kali	30.000		1.500.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	50	Orang/kali	15.000		750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					72.740.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					72.740.000
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					72.740.000
	#NON ASB					
	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV					12.560.000
	Tiket Denpasar -Jakarta Spesifikasi: Ekonomi	2	2 Orang PP	3.262.000		6.524.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi: PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	2	2 Orangx 1Hari	992.000		1.984.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA	4	2 Orangx 2Hari	530.000		2.120.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4	2 Orang x 2 Kali	227.000		908.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA	4	2 Orang x 2 Kali	256.000		1.024.000
	PEJABAT ESELON IV					12.036.000
	Tiket Denpasar -Jakarta Spesifikasi: Ekonomi	2	2 Orang PP	3.262.000		6.524.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	2	2 Orangx 1Hari	730.000		1.460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA	4	2 Orangx 2Hari	530.000		2.120.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4	2 Orangx 2Hari	227.000		908.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA	4	2 Orangx 2Hari	256.000		1.024.000
	GOLONGAN III, II dan I					48.144.000
	Tiket Denpasar -Jakarta Spesifikasi: Ekonomi	8	8 Orang PP	3.262.000		26.096.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	8	8 Orangx 1 Hari	730.000		5.840.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA	16	8 Orangx 2Hari	530.000		8.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2 Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	3 16	4 8 Orang x 2 Kali	5 227.000	6	7 3.632.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA	16	8 Orang x 2 Kali	256.000		4.096.000
GRAND TOTAL						88.455.000

Bali, 2 Januari
PPTK Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si
Pembina Tk.I
NIP 19710601 199301 1 003